

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HakAsasi Manusia

Pengarah

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum

Henry Donald Lbn Toruan, S.H.,M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Pemimpin Redaksi

Ahyar Ari Gayo, S.H.,M.H.,APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

Marulak Pardede, S.H., M.H.,APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)
Nevey VaridaAriani, SH., M.H, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)
Hardianto Djanggih, S.H, M.H. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia)
Muhaimin, S.H., (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H.,M.Si. Jaya Laksana, S.E

Sekretariat

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P. Asmadi, S.H

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom.M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T.(Teknologi Informasi)

Harysandy Permana, S.Kom. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

MitraBestari

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
2. Dr. Dhiana Puspitawati, S.H., L.L.M., Ph.D.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H. C.N.
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail.com

jurnaldejure@yahoo.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap di *submit* pada aplikasi *Open Journal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
ADVERTORIAL	v
KUMPULAN ABSTRAK	vii
Hak Menguasai Negara dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya (<i>State's Right To Take Possession Legal Certainty On Title Over Land and Land Designation</i>) ...	405 - 420
Marulak Pardede	
Penerapan Ekolabel dalam Produk-Produk Hutan Sebagai Upaya Lingkungan Hidup (<i>Application Of Ecolables In Forest Products As An Environmental Environment</i>).....	421 - 434
Syprianus Aristeus	
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah (<i>Legal Protection For Title Over Customary Land In Central Kalimantan</i>).....	435 - 454
Yul Ernis	
Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan (<i>The Crime Of Forest and Land Slash and Burn By Corporation To Clear Land For Estate Purposes</i>)	455 - 478
Diana Yusyanti	
Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal (<i>Policy of Pollution Control in Malaka Strait Due to Ship Accidents</i>).....	479 - 502
Vita Cita Emia Tarigan; Eka N.A.M. Sihombing	
Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik dalam Sistem Pembayaran E-Commerce (<i>Legal Uncertainty In The Use Of Unique Codes In The E-commerce Payment System</i>).....	503 - 516
Teguh Tresna Puja Asmara; Tri Handayani	
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (<i>The Role Of Corruption Eradication Commission (KPK) In Corruption Prevention and Eradication</i>)	517 - 538
Ulang Mangun Sosiawan	

De Jure

Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit
(Warehouse Receipt As Loan Security - Quo Vadis?)..... 539 - 562

Henry Donald Lbn. Toruan; Jamilus

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan
(Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)
(Legal Protection towards the Victim of Extrajudicial Divorce
(A Study in Langsa City, Aceh Province)) 563 - 572

Muhammad Nur; Iman Jauhari; Azhari Yahya

BIODATA PENULIS

PEDOMAN PENULISAN

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bisa kembali menerbitkan Volume 19 Nomor 4 Desember 2019.

Penerbitan-penerbitan Jurnal Penelitian hukum De Jure Volume 19 Nomor 4 Desember 2019 ini, akan memuat 9 (Sembilan tulisan) dari berbagai institusi lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Visi Pemerintahan dalam periode 2019-2014 menempatkan reformasi hukum sebagai aspek yang fundamental dalam arah pembangaunan bangsa. Kebijakan yang dihasilkan harus terdeliver kepada masyarakat dengan evidence-based policy.

Produk perundang-undangan diharapkan semakin memperkuat bahwa perturan yang dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan hambatan laju perekonomian Negara. Disharmoni peraturan yang ada perlu untuk segera dicarikan jalan keluar yang tepat seperti kepemilikan hak atas tanah, Lingkungan, hutan, pertambangan dan perkebunan yang sering kali menghambat investasi dan Keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, redaksi Jurnal penelitian de jure dalam Volume 19 Nomor 4 Desember 2019, mengangkat tulisan yaitu hak menguasai Negara dalam jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah dan peruntukannya, Tindak Pidana Pembakaran hutan dan lahan oleh Korporasi untuk membuka usaha lahan perkebunan, dan kebijakan Pengendalian Pencemaran di selat Malaka yang bersumber dari kecelakaan kapal serta peran komisi pemberantasan korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan hasil karyanya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan dalam penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, memeriksa dan mengkoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Redaksi

Jakarta, Desember 2019

HALAMAN KOSONG

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Marulak Pardede

State's Right To Take Possession Legal Certainty On Ttitle Over Land and Land Designation

Law Research Journal De Jure, 2019 December, Volume 19, Number 4, Page 405-420

The rapid pace of development, especially when related to the current pace of globalization, will certainly rise more and more land-related issues, since the issues will be no longer as simple as estimated, but in such later time, the issues will carry also political, juridical, in particular, the economic values. Currently, the Unitary State of the Republic of Indonesia is one of the countries with a rapid developing economy, this situation will certainly make business doers lurking into Indonesia as a potential place for them to do various businesses. Considering the importance of the land use for a person or a legal entity, a question may arise: what is the legal aspect of legal certainty on land ownership and land designation in Indonesia? This research employs normative juridical research method; The research tools used are library studies, and documents study from primary and secondary materials, and by using qualitative data analysis methods, one can say that: the land-related issues have revealed that the disputes related to the land have their roots, among others, from the ambiguity of the existing regulations and the weaknesses in application of such various regulations in practice. The issues of legal certainty on land title and land designation in Indonesia, are very important legal issues, and is believed to have triggered many consequential problems, if the government is unresponsive to solve them.

Keywords: right to take possession; law; land ownership and land designation.

Syprianus Aristeus

Application Of Ecolables In Forest Products As An Environmental Environment

Law Research Journal De Jure, 2019 December, Volume 19, Number 4, Page 421-434

Improving product competitiveness through improving quality management systems is one of the main keys to winning competition in the global market. When trade liberalization is inevitable in accordance with the era of universalism, the key to winning global competition lies in the superiority of competitiveness and quality management of each product competition. More than that, the application of management systems according to international standards will also provide more benefits and advantages. In addition to winning and improving the market, implementing a quality management system will also increase partner confidence while boosting the product's image in the eyes of consumers. The standard formula that is being developed fully has become a necessity. The formulation of the problem in this paper is, what must be implemented by the Government or producers of Indonesian forestry products to obtain an eco-label certificate? This research is a normative juridical study, this research is based on an analysis of legal norms, both law in the sense of law as it is written in the books and statutes (in literature and legislation. The need for world environmental organizations related to environmental governance international life that requires better coordination.

Keywords: free trade; ecolabeling; the environment.

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Yul Ernis

Legal Protection For Title Over Customary Land In Central Kalimantan

Law Research Journal De Jure, 2019 December, Volume 19, Number 4, Page 435-454

*Regional Regulation No.16 of 2008 regarding Customary Institutions and Governor's Regulation No. 13 of 2009 regarding Customary Land and Customary Title over Land in Central Kalimantan Province have not been adequate in assuring the legal certainty in the protection of customary land rights, the reality shows that until now there have been still many conflicts between Dayak indigenous people and the business doers investing their monies in the region while Article 5 of Governor Regulation No. 13 of 2009 above has ordered the demang (village chiefs) to make inventory of the customary lands in Central Kalimantan but not yet realized. To ensure legal protection for the customary lands, as an inseparable unit from the customary law community, all stakeholders should have the same view and understanding in protecting the existing titles in the region. The purpose is to figure out the current protections of the title over customary land and the legal certainty that the regional regulations on customary land protection have been in place in Central Kalimantan. The research employs a qualitative approach in an empirical juridical research. The results demonstrate that there have been no clear and comprehensive regulations governing the protection of title over the customary land both in national level and in particular, at Central Kalimantan province level. Despite of the existence of some basis for legal protection, both the customary law and the positive law, it may be necessary for the state in the future to secure acknowledgment and to strengthen the regulations in the form of *lex specialis* laws integrating the two legal systems, so that the titles over customary lands will be more certain, fair, and benefiting the communities. Recommendation is that the Central Kalimantan regional government needs to extend the aspects / spectrum / dimensions of the regulation in Governor Regulation No.13 of 2009 regarding Customary Land and Customary Title over Land as well as Governor Regulation No. 4 of 2012 regarding Amendment to the Governor Regulation No. 13 of 2009 regarding Customary Land and Customary Title Over Lands, by establishing Regional Regulations and leveling the understanding between the Regional Government / Central Government, the National Land Agency on Title over Customary Lands issues.*

Keywords: legal protection; customary land rights.

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Diana Yusyanti

The Crime Of Forest and Land Slash and Burn By Corporation To Clear Land For Estate Purposes

Law Research Journal De Jure, 2019 December, Volume 19, Number 4, Page 455-478

Slashing and burning forests and land to clear land for plantations has caused some extensive forest fires causing heavy damages to environment and the existing habitat within the forests. Forest fires are also harmful for the public health, educational activities, economic activities and aerial and land transports, making it difficult to get better and prosperous life both from the spiritual and physical aspects. Residing and living a good and healthy environment is one of the human rights mentioned in article 28 h clause (1) of the 1945 Constitution of Indonesia providing that: "Everyone has the right to live in prosperity both from the physical and spiritual aspects, to settle, and to live a good and healthy environment and also entitled to health services". On the other hand despite of so many regulations threatening with legal punishment for the individual and corporate criminals such as Article 78 clauses (3) and (4) of the Law No. 41 of 1999 connected with the Law No. 19 of 2004 on Forestry, Article 69 clause (1) point (h) and Article 69 clause (2) and article 98 and article 99 of the Law No. 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management, Article 56 clause (1) and article 108 of the Law No. 39 of 2014 regarding Plantations, Article 187 and Article 189 of the Indonesian Criminal Code, as well as the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, they have not been able to give deterrent effect to the corporate criminals to continue their malicious slashing and burning forests and lands. This research uses normative, analytical, descriptive juridical method, employing the legal statutory. If a company repeatedly slashing and burning forests and lands for its plantation business, a regulation that will prevent it from doing business for at least 12 years should be required. In addition it is necessary also to charge the company with other articles of some other laws, charging it also under the administrative and civil codes for some compensation

Keywords: forest burning; corporate liability.

Vita Cita Emia Tarigan

Eka N.A.M. Sihombing

Policy of Pollution Control in Malaka Strait Due to Ship Accidents

Law Research Journal De Jure, 2019 December, Volume 19, Number 4, Page 479-502

Marine pollution that occurs at sea can bring both direct and indirect impacts to human life. One of the areas with worst cases of accidents polluting the marine environment is the Malaka Strait as this strait is so crowded by so many ships, especially giant tankers. The geographical conditions of this strait are so narrow making it prone to ship collisions. This paper attempts to further unravel the policy adopted by Indonesia in order to control the pollution in Malaka Straits caused by ship accidents, using the soft laws and hard law theories. The results show that the level of pollution due to ship accidents in the Malaka Strait has still been high and raising more and more concern due to the obscure and vague policies of Indonesia, the owner of the strait, in integrating the hard law and soft law to control the pollution of its marine environment. Hence the legal provisions on shipping safety and the policies governing the control of pollution of the marine environment caused by the ships, that are both hard law and soft law, cannot be effectively implemented. In order to address this problem, it is necessary for Indonesia as a rule of law to, as soon as possible, consider the accommodation and integration of the elements of soft law and hard law when establishing its laws and regulations, in particular those related to the environmental law.

Keywords: sea; malaka strait; policy; ship; marine pollution.

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Teguh Tresna Puja Asmara; Tri Handayani

Legal Uncertainty In The Use Of Unique Codes In The E-commerce Payment System

Law Research Journal De Jure, 2019 December, Volume 19, Number 4, Page 503-516

People have been highly interested in shopping at electronic commerce (e-commerce) forcing the marketplace to provide some distinctive payment methods, one of which is the method of payment via bank transfer. The bank transfer method requires a unique code to make the payment system efficient. Some methods require a unique code added to the nominal value of the payment while some other methods require a unique code deducted from the nominal value the buyer must pay. In the case of the unique code added to the amount of payment, some e-commerce payment systems refund the unique code back to the user's account, but some e-commerce companies do not refund the unique code since they do not have an electronic money (e-money) system in their application. This research is analytical descriptive using normative juridical approach. The results show that there has been legal uncertainty regarding the use of these unique codes in e-commerce payment systems. This is because the unique code will appear only after the purchase has been checked-out or after the sale and purchase agreement has been approved. In addition, not all e-commerce systems have e-money system, so when there is an addition or deduction to the nominal amount of the payments, a legal uncertainty will arise to both the buyers and sellers, since they have no clear procedures for refunding the additional amount purported to be the unique code.

Keywords: e-commerce; payment system; unique code

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Ulang Mangun Sosiawan

The Role Of Corruption Eradication Commission (KPK) In Corruption Prevention and Eradication

Law Research Journal De Jure, 2019 December, Volume 19, Number 4, Page 517-538

Corruption eradication in Indonesia is one of the most important agendas of the government in order to rid themselves from corruption, collusion and nepotism. Corruption is an extraordinary and systematic crime hence extraordinary efforts are also required in eradicating it. Corruption is an extraordinary crime, the eradication of which will need extraordinary methods (out-of-box) not by employing ordinary means, like business as usual. From the beginning, KPK was designed and vested with extraordinary authorities (superbody) empowering it to uncover slick and dirty practices and to penetrate even the strongest corruption strongholds. It has been proved that by employing strong powers in doing actions such as wiretapping, investigation, without having to go through licensing procedures, and using modern investigative techniques such as surveillance and forensic audits, the KPK, slowly but sure, is able to restore the public confidence. Major cases involving high-ranking officials began to be touched by the KPK. Starting from the relatives of the President, the treasurer of the ruling party, the former National Police Chief, the former ministers including corrupt prosecutors and judges, were brought before the court and jailed. In tandem with the Corruption Court, both have transformed themselves into frightening specters haunting the corruptors. The establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) has in fact introduced a breath of fresh air for the law enforcement in Indonesia. Ones may start to see the results, our CPI has begun to slowly increase one basis point over the past seven years. The success is not without challenges, there are always attempts to fight back by those who feel annoyed by what the KPK has done. For this reason, the Government of Indonesia pays serious attention to the efforts in eradicating corruption by strengthening the institutions and roles of the KPK. The issue to be studied centers around the roles of the Corruption Eradication Commission in preventing and eradicating corruption. The method used is empirical normative method. According to the research, one may conclude that the KPK's responsibilities and roles are establishing coordination with the other agencies with similar duties of eradicating corruption; supervising the agencies powered to eradicate corruption; to make inquiries, investigation and prosecution of corruption cases; to take actions in preventing corruption; and to monitor the administration of the State's affairs. At the same time the KPK has the powers to coordinate investigations, inquiries, prosecutions of corruption cases; to make sure a reporting system in the eradication of corruption is in place; to inquire information about activities related to the corruption eradication from related agencies; to hold hearings or meetings with the agencies authorized to eradicate corruption; to require reports from relevant institutions related to the prevention of corruption.

Keywords: roles; corruption eradication commission; prevention and eradication.

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Henry Donald Lbn. Toruan; Jamilus

Warehouse Receipt As Loan Security - Quo Vadis?

Law Research Journal De Jure, 2019 December, Volume 19, Number 4, Page 539-562

Farmers sometimes have to face the problem of plunging price of food commodities following the harvest season, forcing them to sell their harvested products at very low prices. This problem has been due to the fact that many farmers do not have a warehouse fit to store their harvested products. The proceeds from selling the products have been so low and not enough even to enable them to sow the seeds again, preventing farmers from enjoying improved lives. In view of the problems the farmers often face, the government has issued the Law No. 9 of 2006 that was later amended by the Law No. 9 of 2011 regarding the Law of Warehouse Receipt System or Undang-undang Sistem Resi Gudang (abbreviated as UUSRG). The Warehouse Receipt System is expected to be a solution in addressing the problem of falling price of the commodities following the harvest time by means of allowing the farmers to store their products in warehouses. Warehouse management will issue a warehouse receipt as a document evidencing the title over the goods stored in the warehouse which later may be used as a transferable instrument to secure a loan and the products are the collateral. The law is purported to establish a new legal securities in addition to those already acknowledged in Indonesia, such as mortgage, pledge, fiduciary transfer, and liens. This is due to the fact that the Warehouse Receipt until now has never been used as an instrument that may be charged with any one of such forms of securities. Banks and non-bank financial institutions are still not interested and are hesitant to advance any loan secured by a Warehouse Receipt. The question is, previously it is said that the Warehouse Receipt is transferable, whether the Warehouse Receipt may be referred to as a securities like the other already-acknowledged commercial securities? If the Warehouse Receipt is classified as a securities why the bank until now has not been interested in advancing loans? The method employed to prepare this paper is juridical normative or the method largely known as the literature research. In a juridical normative research there are three kinds of literature materials known as primary, secondary and tertiary materials. This paper is aimed to questioning the existence of Warehouse Receipt which until now has been hardly used as a securities for any loan. The conclusion is that the Warehouse Receipt may be classified as a securities since it is transferable however it is not a kind of commercial securities. A warehouse receipt may be used as a security for a loan, however securing a loan from a bank using this warehouse receipt is quite difficult, because the warehouse receipt does not meet the criteria set by the Banking Law and the Bank Indonesia Law that require ideal and high-quality collateral that is easily liquidated.

Keywords : warehouse receipt; securities and loan security.

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Muhammad Nur; Iman Jauhari; Azhari Yahya

Legal Protection towards the Victim of Extrajudicial Divorce (A Study in Langsa City, Aceh Province)

Law Research Journal De Jure, 2019 December, Volume 19, Number 4, Page 563-572

Divorce adheres the principle that divorce must be witnessed and complicated with the aim of protecting women's rights. This means that every divorce must be carried out before the court and resolved in accordance with the provisions of the legislation. However, in reality in Langsa City there are still many divorces conducted outside the court and this divorce is settled by customary law. Therefore, the main problem which is the core of this study is that how does the implementation of legal protection towards the victims of extrajudicial divorce that occurred in Langsa City? The research method used in this study is empirical juridical research. Data required for this research consists of primary and secondary data. Primary data were collected through field research and secondary data were obtained through library research. All collected data were analyzed by using qualitative analysis. The results indicate that the rights of divorce victims are often ignored because there is no legal protection provided for divorce conducted outside the court. The rights of victims that are often ignored include the cost of iddah period, cost of living for the child, the cost of housing, the settlement of common proverty and the rights to remarry which are recognized by positive law. Therefore, for those who are going to divorce is advised that the divorce should be carried out before the court so that the rights of former wife after divorce can be fulfilled and legally recognized. Furthermore, the government is advised to make strict regulations to avoid divorce outside the court. Then, the village government is advised not to ignore the rules set by the government regarding a ban on divorce outside the court.

Keywords: protection; victim; divorce; extrajudicial.

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Marulak Pardede (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM-RI)****Hak Menguasai Negara dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 4, Desember 2019, Halaman 405-420

Pesatnya laju pembangunan, terutama bila dikaitkan dengan arus globalisasi dewasa ini, masalah pertanahan diyakini akan semakin berkembang pesat pula, karena tidak lagi sekedar masalah sesederhana yang diperkirakan, akan tetapi lebih jauh dari itu akan mempunyai kandungan politis, yuridis, terutama nilai ekonomis. Akhir-akhir ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang berkembang, keadaan ini tentu akan membuat para pengusaha melirik Indonesia sebagai tempat untuk membuka berbagai usaha. Mengingat sangat pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum, menimbulkan pertanyaan : bagaimanakah aspek hukum jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan peruntukannya di Indonesia? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif; Alat Penelitian yang dipergunakan adalah Studi kepustakaan/Library Studies, dan Studi Dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Masalah pertanahan mengungkapkan bahwa timbulnya berbagai persoalan tanah antara lain bepangkal pada adanya karancuan dalam pengaturan dan adanya kelemahan dalam melakukan implementasi berbagai ketentuan dalam praktek. Masalah hukum jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas Tanah di Indonesia, adalah persoalan hukum yang sangat penting, yang diyakini dapat memicu berbagai masalah, jika pemerintah tidak tanggap menyelesaikannya.

Kata kunci: hak menguasai; hukum; kepemilikan tanah dan peruntukan**Kata kunci bersumber dari artikel****Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Syprianus Aristeus (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I)****Penerapan Ekolabel dalam Produk-Produk Hutan Sebagai Upaya Lingkungan Hidup**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 4, Desember 2019, Halaman 421-434

Meningkatkan daya saing sebuah produk melalui peningkatan sistem manajemen mutu menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memenangi kompetisi perdagangan di pasar global. Tatkala liberalisasi perdagangan tak terhindarkan sejalan dengan era kesejagatan, maka kunci memenangi kompetisi global terletak pada keunggulan daya saing dan manajemen mutu setiap komoditas produk. Lebih dari itu, penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar Internasional juga akan memberikan lebih banyak manfaat dan keuntungan. Selain penetrasi dan perluasan pasar, penerapan sistem manajemen mutu juga akan meningkatkan kepercayaan mitra sekaligus mendongkrak citra produk di mata konsumen. Formula baku yang kini diyakini sepenuhnya telah menjelma menjadi sebuah keniscayaan. Rumusan masalah dalam karya tulis ini yaitu, apa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah atau produsen produk kehutanan Indonesia untuk memperoleh sertifikat ecolabel? Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normative, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti law as it is written in the books and statutes (dalam literatur dan peraturan-perundang-undangan. Perlunya organisasi lingkungan hidup dunia terkait dengan tata kelola lingkungan hidup internasional yang memerlukan koordinasi yang lebih baik.

Kata kunci: perdagangan bebas; ecolabel; lingkungan hidup

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Yul Ernis (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 4, Desember 2019, Halaman 435-454

Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng belum cukup memadai dalam menjamin kepastian hukum perlindungan hak atas tanah adat (HAT), kenyataan sampai sekarang masih banyaknya terjadi konflik antara masyarakat adat Dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di daerah tersebut. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap tanah adat, semua stakeholder seharusnya mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama dalam melindungi HAT yang ada di daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian secara yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi yang secara jelas dan komprehensif mengatur tentang perlindungan HAT secara Nasional atau khusus Kalteng. Untuk kedepannya perlu mendapat pengakuan dan penguatan oleh negara dalam bentuk hukum yang *lex specialis* dengan mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut, sehingga HAT memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada. Saran Pemda Kalteng perlu memperluas aspek/spektrum/dimensi pengaturan dalam Peraturan Gubernur No.13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas tanah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, ke dalam bentuk Perda.

Kata Kunci: perlindungan hukum; hak atas tanah adat.

Diana Yusyanti (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 4, Desember 2019, Halaman 455-478

Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan apabila sampai terjadi kebakaran hutan yang meluas dapat menyebabkan kerusakan lingkungan mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, aktifitas pendidikan, aktifitas perekonomian dan transportasi darat maupun udara., sehingga sulit mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin. Bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945. Selain itu terkait pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016, ternyata belum mampu menjadikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korporasi untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis,dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaku tindak korporasi yang berulang kali melakukan pembakaran hutan sebaiknya penyelesaian hukum dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, hukum perdata berupa ganti rugi dan hukum administrasi berupa pencabutan ijin pengelolaan ijin usaha

Kata kunci: pembakaran hutan; pertanggungjawaban korporasi.

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Vita Cita Emia Tarigan (Universitas Pembangunan Pancabudi)****Eka N.A.M. Sihombing (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)****Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 4, Desember 2019, Halaman 479-502

Pencemaran yang terjadi di laut dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan manusia. Salah satu wilayah terparah pencemaran lingkungan lautnya adalah Selat Malaka karena selat ini ramai dilalui oleh kapal-kapal terutama oleh kapal tanker raksasa. Kondisi geografis daripada selat ini sangat sempit sehingga rawan terjadi tubrukan kapal. Tulisan ini mencoba untuk mengurai lebih lanjut kebijakan apa yang diambil Indonesia dalam rangka pengendalian Pencemaran Di Selat Malaka Yang Bersumber Dari Kecelakaan Kapal, dengan menggunakan Teori Soft Law (Hukum Lunak) dan Hard Law (Hukum Keras). Hasil Penelitian menunjukkan jumlah pencemaran yang bersumber dari kapal di Selat Malaka masih tinggi dan makin memprihatinkan hal ini karena kerancuan dan ketidakjelasan kebijakan Indonesia sebagai negara pemilik selat dalam hal pengintegrasian hard law (hukum keras) dan soft law (hukum lunak) hukum pengendalian pencemaran lingkungan laut tersebut. Sehingga pengaturan hukum tentang keselamatan pelayaran dan kebijakan pengaturan hukum pengendalian pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari kapal baik yang bersifat Hard law maupun soft law tidak dapat efektif diimplementasikan dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dipertimbangkan agar Indonesia sebagai negara hukum untuk sesegera mungkin mengakomodir dan mengintegrasikan unsur Soft Law dan Hard Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk bidang yang terkait dengan hukum lingkungan.

Kata kunci: laut; selat malaka; kebijakan; kapal; polusi laut.**Teguh Tresna Puja Asmara; Tri Handayani (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)****Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik dalam Sistem Pembayaran E-Commerce**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 4, Desember 2019, Halaman 503-516

Tingginya minat masyarakat dalam berbelanja di electronic commerce (e-commerce) membuat marketplace menyediakan berbagai metode pembayaran salah satunya yaitu metode pembayaran melalui transfer bank. Metode transfer bank tersebut, dalam pelaksanaannya membutuhkan kode unik guna mengefisienkan sistem pembayaran. Kode unik ada yang ditambahkan dari nominal yang seharusnya dibayar ada juga yang dikurangi dari nominal yang harus dibayar pembeli. Dalam hal penambahan dana terkait kode unik ada beberapa e-commerce yang mengembalikan dananya ke dalam akun pengguna, akan tetapi masih banyak e-commerce yang tidak mengembalikan dana kode unik tersebut dikarenakan tidak memiliki sistem electronic money (e-money) di aplikasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum terkait penggunaan kode unik dalam pembayaran sistem e-commerce. Hal tersebut dikarenakan kode unik muncul setelah dilakukannya transaksi atau setelah dibuatnya perjanjian jual beli. Selain itu, tidak semua e-commerce memiliki sistem e-money, sehingga pada saat adanya penambahan maupun pengurangan nominal pembayaran yang seharusnya dibayar, dapat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli maupun penjual, dikarenakan tidak adanya mekanisme yang jelas guna mengembalikan dana yang telah ditransferkan dalam bentuk kode unik.

Kata Kunci: e-commerce; sistem pembayaran; kode unik

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Ulang Mangun Sosiawan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 4, Desember 2019, Halaman 517-538

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (superbody) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor serta menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun. Terbukti dengan kewenangan yang kuat seperti penyadapan, penyidikan, tanpa harus menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik investigasi modern seperti surveilliance dan audit forensic, KPK perlahan mampu mengembalikan kepercayaan public. Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menguatkan lembaga dan peran KPK. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran komisi pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan adalah normative empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa KPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervise; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; melakukan tindakan pencegahan; dan melakukan pemantauan (monitoring) penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan; meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang; meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: peran; komisi pemberantasan korupsi; pencegahan dan pemberantasan.

Henry Donald Lbn. Toruan; Jamilus (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 4, Desember 2019, Halaman 539-562

Pendapatan diperoleh petani selama ini tidak cukup untuk modal menanam kembali, mengakibatkan tidak ada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan UU No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (disingkat UUSRG). Sistem Resi Gudang diharapkan sebagai solusi mengatasi jatuhnya harga komoditi saat panen dengan cara menyimpan hasil panen petani di gudang. Pengelola gedung akan mengeluarkan Resi Gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan sebagai jaminan utang yang dapat dialihkan dengan agunan inventori. Menjadi pertanyaan, apakah Resi Gudang dapat disebut sebagai surat berharga bagian dari surat berharga komersial? Apabila Resi Gudang dikategorikan sebagai jaminan mengapa pihak perbankan belum tertarik memberikan pembiayaan kredit?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Tulisan ini bertujuan mempertanyakan keberadaan Resi Gudang yang masih sulit diterapkan sebagai surat berharga jaminan kredit. Kesimpulan bahwa Resi gudang termasuk sebagai surat berharga karena mudah dialihkan pada orang lain, tetapi resi gudang bukan termasuk sebagai bagian dari surat berharga komersial. Meskipun resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang tetapi agunan resi gudang tidak bisa dijadikan jaminan utang pada perbankan karena tidak sesuai kriteria UU Perbankan dan UU BI.

Kata kunci : resi gudang, surat berharga dan jaminan kredit

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Muhammad Nur; Iman Jauhari; Azhari Yahya (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)****Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 4, Desember 2019, Halaman 563-572

Perceraian menganut prinsip harus dipersaksikan dan dipersulit dengan tujuan untuk melindungi hak perempuan. Hal ini berarti setiap perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Dalam kenyataannya di Kota Langsa masih banyak perceraian dilakukan di luar pengadilan dan perceraian tersebut diselesaikan secara adat desa. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kota Langsa? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak korban perceraian sering diabaikan, karena belum ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap perceraian di luar pengadilan. Hak-hak korban yang sering diabaikan antara lain biaya masa iddah, biaya nafkah anak, biaya tempat tinggal, penyelesaian harta bersama dan hak untuk menikah lagi. Kepada pihak yang akan bercerai disarankan agar perceraian tersebut dilakukan di depan pengadilan sehingga hak-hak istri setelah terjadi perceraian dapat terpenuhi dan diakui secara hukum. Kepada pemerintah disarankan agar membuat regulasi yang lebih tegas untuk menghindari terjadinya perceraian di luar pengadilan. Kepada pemerintah desa agar tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang larangan perceraian di luar pengadilan.

Kata kunci: perlindungan; korban; perceraian; luar pengadilan.